

ANALISA TRANSFORMASI DESA DALAM SOSIOLOGI KOMUNITAS DAN EPISTEMA JURGEN HABERMAS

Sri Anom Amongjati

Mahasiswa Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana IPB

Desa sebagai sebuah institusi lokal paling kecil dalam struktur pemerintahan memiliki sejarah historis yang sama umurnya dengan bangsa ini bahkan ketika awal permulaan masa raja-raja di Indonesia. Hal ini tentu saja memberikan gambaran kepada kita bahwa ikatan-ikatan yang muncul didalamnya berupa nilai, norma, dan kebudayaan berkembang seiring dengan perkembangan sejarah manusia dari generasi ke generasi. Namun yang terjadi pada hari ini adalah kondisi desa yang jauh dari kesan romantisme yang bisa dibayangkan, setidaknya bila ingin berpendapat bisa jadi sebagian desa sudah kehilangan romantisme tersebut, sebagian lagi sedang menjelang untuk kehilangan tersebut, dan sebagian lagi mungkin akan menunggu waktu berakhirnya seiring pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana masyarakat desa membangun nilai-nilai yang dimiliki saat ini ditengah tekanan modernitas?

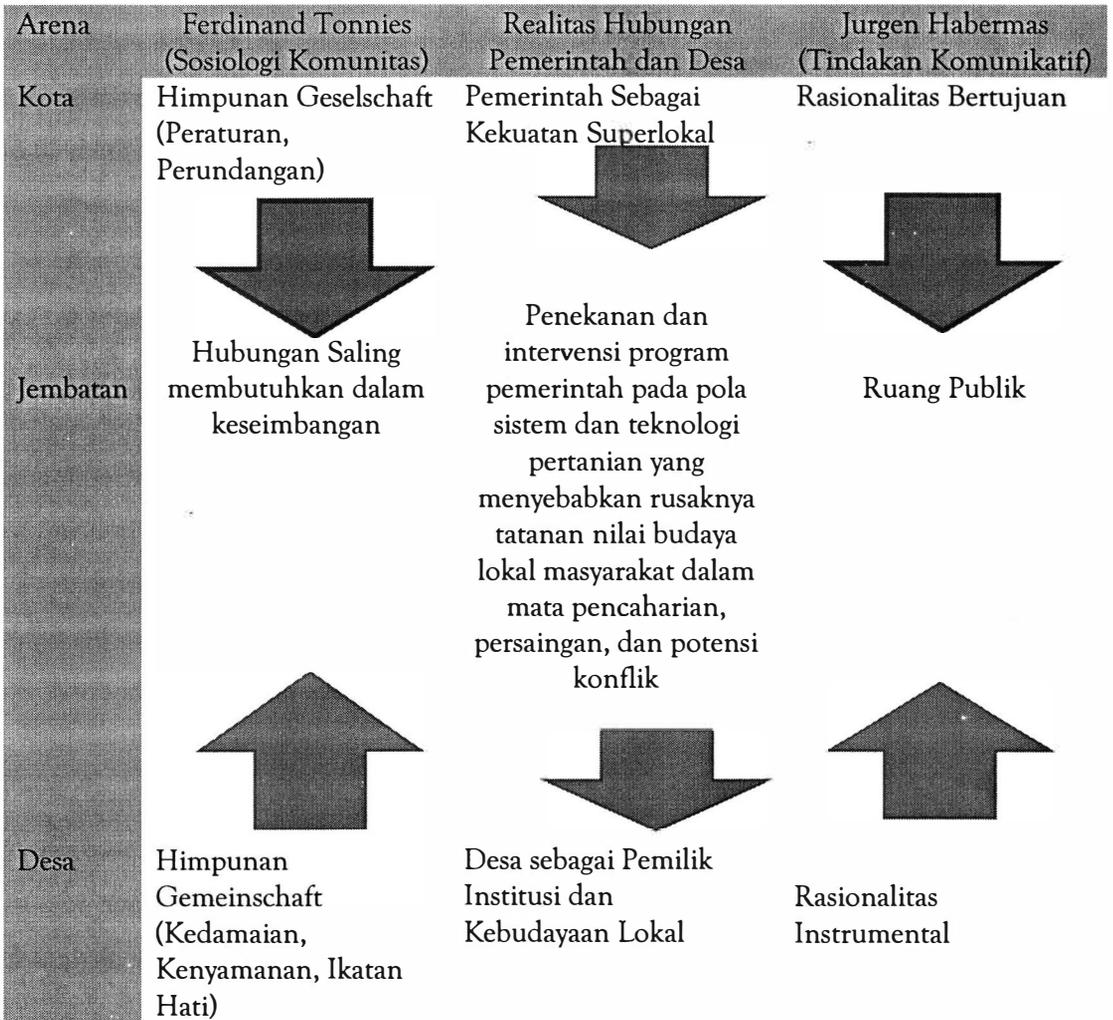
Pandangan umum yang seringkali muncul adalah desa sebagai sebuah wilayah tempat tinggal yang lebih beradab dibandingkan kota muncul sebagai sebuah pandangan orang-orang yang mencintai romantisme desa. Namun hal ini tentu akan berbanding terbalik ketika orang-orang kota melihat desa sebagai sebuah wilayah dengan anggapan bodoh, lambat dalam berpikir dan bertindak, mudah tertipu, dsb. [1]. Bisa jadi aspek rasionalitaslah yang membedakan bagaimana orang desa memandang kota dan begitu juga sebaliknya.

Bila melihat dari bagaimana manusia berinteraksi didalamnya, Ferdinand Toonies sejatinya melihat dalam dua bentuk utama, yaitu *Gemeinschaft* (Komunitas)

dan juga Gessellschaft (Masyarakat). Komunitas dibentuk sebagai dari bentuk-bentuk kenyamanan dan kepuasan dalam diri mereka sendiri atas situasi yang ada. Persaudaraan dan ikatan simpati diantarnya tumbuh menjadi sesuatu yang ingin dicapai. Hal ini berbeda dengan Masyarakat dimana ikatan tersebut bersifat lahir dalam bentuk peraturan dan undang-undang. [2]. Persahabatan sudah tidak menjadi lebih penting bila dibandingkan dengan ikatan-ikatan luar berupa peraturan dan undang-undang. Konsep inilah yang kemudian bisa menggambarkan dua bentuk yang berbeda antara Gemeinschaft yang digambarkan sebagai representasi desa dan Gessellschaft sebagai representasi kota saat ini. Tonnies telah membedakan ini berdasarkan kondisi desa dan kota [3], dan ciri-ciri ini begitu identik dalam perbedaan desa kota di Indonesia yang dicirikan oleh adanya sejumlah orang yang tinggal disuatu tempat tertentu, adanya sistem hubungan, ikatan atas dasar kepentingan bersama, tujuan dan bekerjasama, rasa solidaritas, sadar akan adanya interpedensi, adanya norma-norma dan kebudayaan.

Pada dasarnya Tonnies tidak menolak adanya pembagian ini dan melihatnya sebagai sebuah relasi timbal balik yang akan saling memiliki ciri-ciri antara satu dengan lainnya, dimana Gesellschaft tidak akan ada tanpa Gemeinschaft dan juga sebaliknya dalam realita kehidupan.

Bahwa seseorang membutuhkan ketenangan dalam hidupnya seperti hiburan dan istirahat, namun disisi lain dia membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari. Begitulah konsep timbal balik yang saling mempengaruhi sebagaimana yang dimaksud. Namun disini Tonnies juga mengkritisi ketika perkembangan manusia semakin rasional dan cenderung berat ke arah Gessellschaft. Lalu dimanakah posisi desa saat ini?



Gambar 1. Ilustrasi Konsep Sosiologi Komunitas Ferdinand Tonnies, Tindakan Komunikatif Habermas, dan Realitas Kasus di Ogan Ilir Sumatera Selatan

Apa yang dikritisi oleh Tonnies dimana masyarakat saat ini sudah semakin rasional dapat kita lihat realitasnya pada kehidupan masyarakat kota dan desa. Aspek rasional yang ditularkan dalam bentuk kebijakan, peraturan, dan perundang-undangan pada akhirnya menekan kekuatan lokal dari desa itu sendiri. Apa yang

terjadi di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan dimana kebijakan pemerintah dalam bidang pertanian digunakan/menjadi alat pemaksa penerapan teknologi baru yang menggantikan posisi sistem lokal dalam pengelolaan sistem padi sawah lebak. Akibat yang muncul boleh jadi keuntungan ekonomi, namun akibat-akibat yang muncul berikutnya adalah hilangnya kekerabatan dan nilai-nilai dalam masyarakat akibat kebijakan pemerintah yang mengharuskan adanya persaingan diantara petani hingga marjinalisasi perempuan dalam bidang pertanian yang sebelumnya memiliki peranan yang sangat penting. [4]. Inilah bentuk penerjemahan kritik dari Tonnies terhadap makin timpangnya antara *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft* yang semakin tertekan.

Begitu juga dalam kritik yang diberikan oleh Jurgen Habermas terhadap Max Weber dimana aspek rasionalitas masih sangat sempit pada pencapaian pertumbuhan ekonomi belaka yang dimana ini disebut sebagai rasionalitas bertujuan, atau juga dalam hubungan didalam masyarakat disebut Rasionalisasi kekuasaan.

Masalah Rasionalisasi kekuasaan dilihat oleh Habermas sebagai masalah yang belum selesai dimana perkembangan teknis masih belum ditentukan oleh konsensus demokratis warga masyarakat. Akibatnya setiap kemajuan teknis baru, karena dihadapi tanpa persiapan, menggerogoti bentuk-bentuk kegiatan yang dan tingkah laku kehidupan yang ada, dan inilah yang oleh Habermas disebut sebagai sebuah tindakan negatif teknologi terhadap sosial kehidupan [5].

Bila kita menghubungkan dengan proses transformasi desa yang terjadi saat ini, maka desa telah mengalami tekanan struktural bukan hanya dalam bentuk tekanan ekonomi berupa industrilasi desa dan pengambilan keuntungan sebesar-besarnya atas alam desa, namun juga pengkerdilan bentuk-bentuk nilai kehidupan sebagai perekat dalam masyarakat. Ada dua pendekatan yang memungkinkan terjadinya transformasi desa saat ini, yaitu 1) Bentuk-bentuk rasionalitas bertujuan yang diterjemahkan sebagai proses kebijakan pembangunan desa ala pemerintah, yang oleh habermas disebut sebagai rasionalisasi bertujuan dalam bentuk gagasan sistem berupa ekonomi dan negara melakukan tindakan-tindakan yang justru mempengaruhi dunia

kehidupan (etc: Norma dan Nilai) [6] dan 2) bentuk rasionalisasi menghadapi proses persaingan yang mulai tumbuh diantara masyarakat akibat akumulasi modal yang oleh Tonnies disebut sebagai *rational will* [7]. Yang terjadi apa berikutnya? Konflik-konflik yang terjadi di desa akibat persaingan dalam akumulasi modal guna mengamankan suntikan-suntikan dalam bentuk modal yang ditularkan oleh sistem negara dan ekonomi (berkaca yang disampaikan oleh Habermas) berakibat hilangnya ciri-ciri masyarakat desa yang kita bayangkan sebelumnya.

Kasus yang terjadi dalam pemberitaan di media massa berupa pembunuhan yang dilakukan terhadap salim kancil merupakan contoh kencil yang menunjukkan bahwa rasionalitas sudah dijadikan sebagai alat guna pemenuhan modal sebesar-besarnya dan meminggirkan nilai-nilai masyarakat pedesaan yang kita kenal. Atau juga persaingan antar kelompok tani yang mengakibatkan tersingkirnya kelompok tani lainnya dari bantuan-bantuan pemerintah dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah, sebagai pelaksana kebijakan dan hukum, berdasarkan pendekatan Habermas dan Tonnies memiliki peranan penting terhadap terjadinya pelunturan dunia-kehidupan di desa. Ada sebuah proses transformasi yang dapat dikatakan salah pengamatan, salah penindakan, dan salah penyipan didalamnya

Melihat dari transformasi yang terjadi di desa dan dalam hubungannya antara desa dan kota, maka sejatinya kita akan menemukan bahwa ini muncul dari pandangan yang keliru dalam menerjemahkan arti kebutuhan bagi masyarakat desa. Persoalan kemiskinan bukanlah menjadi tema utama dalam menganalisa kondisi desa saat ini, karena hubungan desa kota, khususnya daerah Jawa sudah memiliki dampak yang cukup signifikan dalam meningkatkan perekonomian di pedesaan.

Namun kemajuan ekonomi itu bukanlah tanpa suatu kerentanan yang mengkhawatirkan. Persaingan tanpa kompromi diantara pelaku ekonomi di pedesaan mengakibatkan mereka yang tidak mampu bertahan akan kembali masuk kedalam perangkap kemiskinan. Artinya kita akan menemukan kondisi yang jauh lebih buruk

daripada kondisi dimana nilai-nilai dunia kehidupan masih berlaku didalamnya. Bisa jadi kita akan melihat efek-efek pembangunan yang lahir di pedesaan hanya dapat kita lihat di pinggiran jalan saja, namun jauh dipelosok ada kehidupan yang rentan dengan perangkap kemiskinan. Seiring dengan pertumbuhan yang ada, maka bagi mereka yang pesimis, maka laju ini tidak lagi akan terkendali dan kehidupan desa yang harmonis akan sekedar menjadi khayalan masa lampau. Maka karena itu, ada dua aspek yang secara sepintas akan terjadi berlawanan. Apakah kita mengedepankan aspek rasionalitas belaka atau kemudian kita hanya akan mengedepankan aspek dunia kehidupan dengan mengacuhkan satu dengan yang lainnya? Bila Tonnies dalam pandangan terkait *Gemeinschaft* dan juga *Gessellschaft* haruslah beriringan, apakah itu dapat kita terapkan dalam proses transformasi di Desa saat ini?

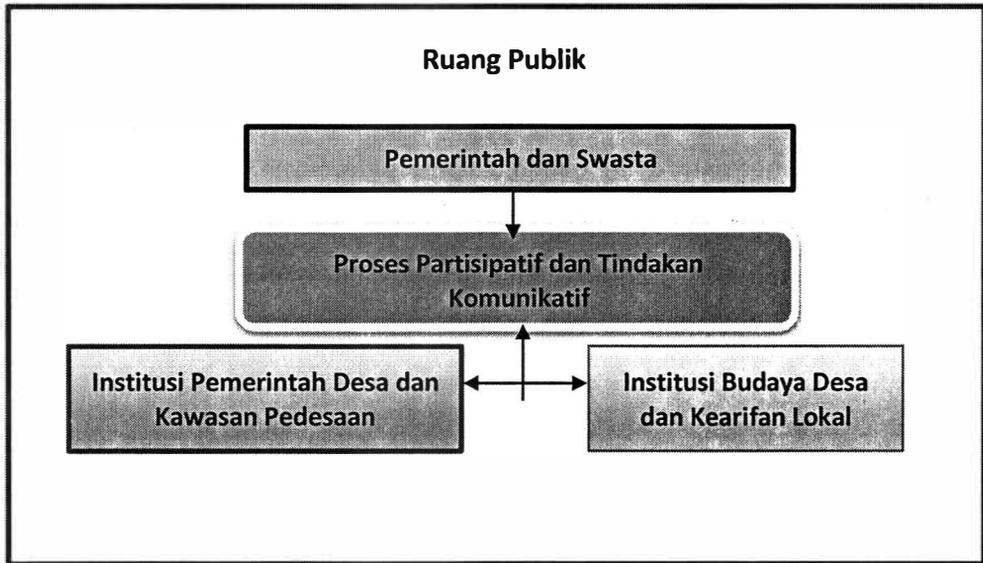
Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, Habermas melihat bahwa masalah fundamental teori sosial saat ini adalah bagaimana menghubungkan dengan cara yang memuaskan kedua strategi konseptual yang diindikasikan oleh gagasan “sistem dan “dunia kehidupan[8]. Sebagaimana yang dikritik oleh Tonnies bahwa *Gessellschaft* lebih mendominasi *Gemeinschaft*, maka begitu juga yang diungkapkan oleh Habermas. Rasionalitas bertujuan yang lebih dijadikan sebagai dasar teori rasional memiliki kritik dari Habermas dikarenakan dianggap terlalu mendominasi rasionalisasi institusional. Ketimpangan inilah yang kemudian perlu dijelaskan bahwa keduanya memerlukan sebuah tindakan yang seimbang dan tidak mengenyahkan satu dan lainnya.

Bentuk dari tindakan rasional bertujuan adalah perkembangan kekuatan produksi, kemajuan, dan perluasan control teknis atas alam dan proses objektif. Adapaun dalam kerangka kerja institusional, rasionalisasi adalah melalui medium bahasa untuk menanggalkan pembatas komunikasi. [9].

Dari pandangan tersebut, antara Tonnies dan Habermas memiliki sebuah kesamaan sikap bahwa tindakan rasional bertujuan yang banyak dipakai oleh *Gessellschaft* harus menempatkan pada posisi yang sama dengan sistem kehidupan

yang dipakai oleh *Gemeinschaft*, bukan justru memisahkan antara satu dan lainnya karena keduanya merupakan sebuah keterpaduan dan perlu dilakukan diskursus oleh keduanya. Karena itu Habermas memperlihatkan posisi ruang publik sebagai wilayah guna membangun opini public dan menjadi tandingan bagi negara guna melahirkan mediasi bagi dua pihak yang dalam hal ini adalah negara dan masyarakat [10]. Selanjutnya hal inilah yang melahirkan tindakan komunikatif mengacu pada tindakan yang diarahkan oleh norma yang disepakati bersama berdasarkan haapan timbal balik di antara subjek-subjek yang berinteraksi.

Dalam konteks proses partisipatif masyarakat dalam menentukan pilihan-pilihan yang sesuai pada konteks masyarakat desa boleh jadi ini memberikan sebuah jembatan yang nyata. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang Desa dimana desa memiliki integritas dan kewenangan untuk bersama sama dengan kesamaan ekologis membangun kawasan pedesaan yang dapat memperkuat basis ekonomi masyarakat. Ruang publik inilah yang telah dibangun oleh Negara guna menampung masyarakat guna masuk dalam proses komunikasi antara negara dan masyarakat. Sekilas ini mampu menampung sebuah konsep yang dianjurkan oleh Habermas dan menjawab pertanyaan terkait transformasi desa yang diharapkan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah mampukah hal ini menjawab efek-efek modernitas yang terjadi berupa hilangnya nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat? Apakah ini akan menjamin lahirnya sebuah kesetaraan atau justru akan memunculkan monopoli-monopoli baru di pedesaan?



Gambar 2. Proses Pelibatan Institusi Budaya dalam diskursus Pengembangan Ekonomi Desa dan Pemerintah/Swasta

Proses fasilitasi yang dilakukan pada Pengembangan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) sebagai bentuk implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 melibatkan SKPD dan perangkat-perangkat desa dalam penyusunan proses perencanaan dan rancangan. Namun pada prosesnya, proses ini terasa “kering dan gersang” ketika melihat capaian akhir dari keberhasilan program hanyalah capaian kuantitatif berupa keuntungan yang bersifat numerik. Namun ini tidak menjawab bagaimana menjaga nilai dan norma budaya lokal agar dapat bertahan seiring dengan perkembangan ekonomi. Oleh karena itu dibutuhkan dua hal guna melengkapi implementasi Undang-undang ini, diantaranya adalah: 1) Membangun kesadaran budaya lokal dalam kontruksi partisipatif aparat desa dan 2) Melibatkan insititusi adat-lokal didalam proses partisipatif. Solusi ini sejatinya diharapkan dapat menjawab pertanyaan arah dari perkembangan desa di Indonesia kedepan, dimana diisatu sisi kita tidak akan mampu untuk menolak lahirnya modernitas dan perlunya modernitas di pedesaan, namun sejatinya kita perlu membangun sebuah kerinduan

bagi romantisme desa masa lampau.

Dalam menerapkan langkah ini, optimisme yang muncul adalah ini merupakan sebuah jawaban di persimpangan jalan namun dapat juga menjadi sikap pesimisme ketika harus menjawab persoalan desa yang sudah “terlanjur” semakin erat dengan budaya kota dan sulit untuk menemukan nilai-nilai dunia kehidupan yang masih utuh sebagaimana yang dilihat di wilayah pulau Jawa. Perlu sebuah kajian yang mendalam bagaimana membangun diskursus antara budaya desa yang sudah terdominasi oleh budaya kota dan membangun hubungan yang setara antara keduanya. Namun penerapan proses partisipatif dalam masyarakat yang melibatkan insititusi pemerintah pusat, pemerintahan lokal dan budaya lokal dalam satu ruang public memiliki peluang lebih besar ketika penerapannya dilakukan diluar jawa, baik dari jumlah kota yang tidak terlampau banyak, Masyarakat yang sedikit, kekayaan alam yang relative lebih baik, dan keterjagaan institusi lokal. Hal inilah yang menjadi pembeda antara Jawa dan luar jawa dalam proses penerapan proses partisipatif tersebut.

- [1] M. Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu, Bandung: Refika Aditama, 2000, hlm. 131.
- [2] Clifton D Bryant & Dennis L Peck, 21st Century Sociology Vol.1, California: Sage Publications, 2007, hlm 455.
- [3] Ibid, hlm 456
- [4] Yunindyawati , Disertasi: Kuasa Pengetahuan Perempuan dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan Keluarga Petani Padi Sawah Lebak di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, Institut Pertanian Bogor, Bogor: 2015
- [5] F Budi Hardiman, Menuju Masyarakat Komunikatif, Penerbit Kanisus,

Yogyakarta: 2013, hlm 99.

[6] Ibid, hlm 100.

[7] Clifton D Bryant & Dennis L Peck, Op.cit, hlm 133.

[8] G. Ritzer. Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, Pustaka Pelajar, Yogyakarta; 2012, hlm 918.

[9] Sri Sumartini, Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial: Tindakan Komunikatif Jurgen Harbemas, Aditya Media Publishing, Malang: 2010, hlm.332

[10] F Budi Hardiman, Op cit, hlm.151

DAFTAR PUSTAKA

Bryant, D C & Peck L D. 2007. 21st Century Sociology Vol.1. California: Sage Publications

Yunindyawati. 2015. Disertasi Kuasa Pengetahuan Perempuan dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan Keluarga Petani Padi Sawah Lebak di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Bogor: Institut Pertanian Bogor

Hardiman F B. 2013. Menuju Masyarakat Komunikatif. Yogyakarta: Penerbit Kanisius

Ritzer G. 2012. Teori Sosiologi: Dari Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sumartini S. 2010. Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial: Tindakan Komunikatif Jurgen Harbemas. Malang: Aditya Media Publishing

Soelaeman M. 2000. Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu. Bandung: Refika Aditama